



Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Koperasi dan UMKM

Karisma Naurunnisa

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
nisakharisma25@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Studi ini bertujuan menganalisis strategi, tantangan, dan dampak pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM berbasis komunitas dan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis multi-kasus, mengacu pada hasil-hasil penelitian, pengabdian masyarakat, dan laporan empiris dari berbagai wilayah di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa koperasi wanita, organisasi Islam perempuan, dan komunitas UMKM berperan signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan, kapasitas manajerial, kemandirian ekonomi, serta akses legalitas usaha bagi perempuan. Namun, tantangan berupa rendahnya literasi digital, akses modal, partisipasi anggota, dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Rekomendasi strategis yang diusulkan meliputi integrasi pelatihan kewirausahaan, digitalisasi akuntansi, pendampingan legalitas usaha, serta penguatan kelembagaan koperasi dan sinergi multipihak. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan partisipatif untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Kata-kata kunci : *Koperasi Perempuan, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi.*

Abstract

Women's economic empowerment is an important foundation for sustainable development and poverty alleviation in Indonesia. This study aims to analyze the strategies, challenges, and impacts of women's economic empowerment through community and faith-based cooperatives and MSMEs. The research uses a descriptive qualitative approach with literature study and multi-case analysis methods, drawing on research results, community service, and empirical reports from various regions in Indonesia. The main findings show that women's cooperatives, women's Islamic organizations, and MSME communities play a significant role in improving financial literacy, managerial capacity, economic independence, and access to business legality for women. However, challenges such as low digital literacy, access to capital, member participation, and the quality of human resources are still major obstacles. Strategic recommendations include the integration of entrepreneurship training, accounting digitalization, business legality assistance, as well as cooperative institutional strengthening and multi-stakeholder synergy. This study emphasizes the importance of a holistic and participatory approach to strengthen women's economic empowerment in Indonesia.

Keywords: Women's Cooperatives, MSMEs, Economic Empowerment.

Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi perempuan telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan agenda pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM), tercatat bahwa sekitar 64% dari total 65,5 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah perempuan. Angka ini mencerminkan peran

penting perempuan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, khususnya dalam menghadapi krisis ekonomi maupun pandemi global (Widiarty, 2024).

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya tingkat literasi keuangan, kurangnya adopsi teknologi digital, lemahnya perlindungan hukum, serta kompleksitas dalam pengurusan dokumen legal usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) (Tholib et al., 2021).

Selain menghadapi hambatan struktural, perempuan pelaku UMKM juga dihadapkan pada beban ganda, di mana mereka harus mengelola usaha sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kapasitas perempuan dalam mengembangkan usaha secara optimal (Anjani, 2021). Di sisi lain, dominasi budaya patriarki, ketimpangan gender, serta diskriminasi dan stereotip negatif terhadap perempuan turut memperkuat posisi subordinat mereka, baik dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun dalam akses terhadap sumber daya produktif (Stiawati et al., 2025). Permasalahan ini semakin diperparah oleh terbatasnya dukungan kelembagaan, minimnya pelatihan kewirausahaan, serta rendahnya pemahaman mengenai legalitas usaha dan sistem keuangan formal (Chotijah et al., 2022).

Organisasi perempuan berbasis keagamaan, seperti 'Aisyiyah Muhammadiyah, Muslimat NU, dan Persistri Persis, telah memainkan peran signifikan dalam merespons tantangan tersebut. Upaya mereka tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas ekonomi, pendidikan, advokasi hukum, serta layanan kesehatan. Koperasi perempuan, baik yang berbasis komunitas maupun keagamaan, telah berkembang menjadi platform strategis bagi perempuan dalam mengakses pembiayaan, pelatihan, dan jejaring pemasaran (Haryanto, 2016). Selain itu, komunitas UMKM perempuan dan organisasi seperti IWAPI turut aktif dalam mendorong peningkatan literasi keuangan dan digitalisasi pencatatan keuangan melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan (Tarmizi et al., 2025).

Relevansi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM juga diperkuat oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang inklusif dan adil (Ningrum et al.). Namun demikian, efektivitas program pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan pendampingan, dukungan dari lembaga terkait, serta sinergi lintas sektor (Afifah, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif model pemberdayaan ekonomi perempuan yang berbasis pada koperasi dan UMKM di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta perumusan strategi penguatan yang kontekstual dan relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan dan praktik pemberdayaan ekonomi perempuan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Metode Penelitian

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi Muhammadiyah dan Aisyiyah, serta berita dan koperasi. Analisis dilakukan secara tematik untuk menggali peran, tantangan, dan strategi pengembangan koperasi perempuan Muhammadiyah.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu isu strategis dalam upaya pembangunan berkelanjutan, baik dalam konteks global maupun nasional. Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi mengalami peningkatan signifikan, terutama melalui keikutsertaan mereka dalam koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua sektor ini telah terbukti menjadi wahana penting dalam mendorong partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian finansial mereka. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan di ranah domestik. Kendati demikian, proses pemberdayaan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural seperti ketimpangan gender, akses yang terbatas terhadap sumber daya produktif, rendahnya tingkat literasi keuangan, dan keterbatasan penguasaan teknologi digital yang menjadi semakin krusial di era transformasi digital (Bappebas, 2021)

Secara umum, perempuan memainkan peran vital dalam struktur perekonomian nasional melalui kontribusi mereka di sektor UMKM. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelaku utama usaha, tetapi juga sebagai pengelola, produsen, distributor, hingga konsumen aktif dalam berbagai rantai nilai ekonomi. Perempuan banyak terlibat dalam sektor informal dan industri kreatif, khususnya mereka yang menjalankan kegiatan usaha dari rumah, sehingga tetap memungkinkan untuk menjalankan peran domestik sekaligus publik. Meskipun kontribusi ini sangat signifikan, pengakuan formal terhadap peran mereka masih belum setara, terutama dalam aspek kepemilikan usaha, akses terhadap modal usaha, dan legalitas usaha. Misalnya, studi yang dilakukan di Desa Paksewali menunjukkan bahwa perempuan merupakan kekuatan utama dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa, namun kepemilikan formal atas usaha masih didominasi oleh laki-laki sebagai kepala keluarga, menandakan masih adanya hambatan sistemik terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan (Susiana, 2025).

Dalam menanggapi tantangan-tantangan tersebut, pengembangan koperasi yang dikelola oleh perempuan telah muncul sebagai strategi yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi. Koperasi perempuan tidak hanya menyediakan akses terhadap pembiayaan mikro, tetapi juga menjadi sarana kolektif untuk memperkuat kapasitas perempuan. Melalui koperasi, perempuan dapat memperoleh pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses ke jaringan pemasaran yang lebih luas. Modal sosial berupa solidaritas antaranggota koperasi menjadi kekuatan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi komunitas. Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam UMKM juga memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu dan lokasi kerja, sehingga mereka tetap dapat melaksanakan tanggung jawab domestik sembari tetap berkontribusi secara ekonomi. Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, lemahnya sistem tata kelola koperasi,

dan keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital yang kian penting pada era ekonomi berbasis informasi.

Pendekatan yang holistik dalam pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan penguatan kapasitas dari berbagai aspek, seperti pelatihan dalam manajemen usaha, peningkatan literasi keuangan, fasilitasi legalitas usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung strategi pemasaran digital dan efisiensi pengelolaan usaha. Pendekatan ini mensyaratkan adanya dukungan kolaboratif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor ini dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan adaptasi perempuan terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Sejumlah studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan. Contohnya, di wilayah Jawa Barat, pelaksanaan program pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM perempuan terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha dan memperluas pasar hingga ke tingkat nasional (Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, 2024).

Namun demikian, penting untuk memahami bahwa pemberdayaan ekonomi tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat (Kabeer, 1999). Nilai-nilai budaya, norma sosial, serta struktur peran gender sering kali menjadi penghambat dalam akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi (World Bank, 2020). Oleh sebab itu, setiap program pemberdayaan ekonomi harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan dilakukan dengan pendekatan partisipatif (FAO, 2019). Dalam pendekatan ini, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga diposisikan sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transformasi sosial dan ekonomi (UN Women, 2018). Pendidikan juga berperan penting dalam menyiapkan perempuan agar memiliki kapasitas yang memadai dalam pengambilan keputusan, kemampuan inovatif, dan keterampilan dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan (Mosedale, 2005).

Kebijakan publik memiliki peranan krusial dalam menciptakan sistem pendukung bagi pemberdayaan ekonomi perempuan (KemenPPPA, 2021). Kebijakan yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender, penyediaan akses permodalan, serta pelatihan berkelanjutan merupakan komponen strategis dalam kerangka pemberdayaan (OECD, 2017). Pemerintah diharapkan mampu memfasilitasi pembentukan koperasi perempuan berbasis komunitas, memberikan insentif fiskal, dukungan teknis, serta memperkuat jaringan kemitraan lintas sektor. Selain itu, pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi penting untuk menjamin perempuan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya pembangunan (KemenPPPA, 2021).

Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis gender guna menilai efektivitas program secara menyeluruh. Keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya diukur dari aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga dari sisi perubahan sosial yang dihasilkan (OECD, 2017). Indikator keberhasilan meliputi peningkatan rasa percaya diri perempuan, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (Kabeer, 1999). Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi strategi kunci dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil serta inklusif (UN Women, 2018).

Hambatan dan Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Salah satu kendala utama yang dihadapi perempuan pelaku UMKM adalah keterbatasan akses modal dan sumber daya ekonomi. Banyak perempuan memulai usaha dengan modal terbatas dan sulit mengakses pembiayaan formal karena kurangnya jaminan dan dokumen usaha yang lengkap. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha dan memperluas pasar. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses modal, termasuk program pembiayaan mikro dan insentif khusus bagi UMKM perempuan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023).

Era digital membuka peluang besar bagi UMKM perempuan untuk memperluas pasar melalui pemasaran online. Namun, rendahnya literasi digital menjadi hambatan signifikan². Penelitian Kurniawati et al. (2020) pada anggota Koperasi Wanita Atsiri di Bogor menunjukkan bahwa sebagian besar anggota masih mengandalkan pemasaran tatap muka dan belum mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi. Padahal, data nasional menunjukkan hanya sekitar 8% UMKM yang menggunakan media sosial secara optimal, padahal pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan pendapatan hingga 26%. Pelatihan pengenalan platform media sosial, pembuatan konten, dan branding produk telah terbukti meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri perempuan dalam pemasaran digital, sehingga intervensi pelatihan digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM perempuan (Kurniawati et al., 2022).

Literasi keuangan juga menjadi aspek krusial bagi keberlangsungan usaha UMKM perempuan³. Studi Marianah, Zaenafi Ariani, dan Suwati (2023) mengungkap bahwa sebelum pelatihan, sebagian anggota Koperasi Wanita 'Aisyiyah Lombok Utara belum memiliki pencatatan keuangan yang rapi meskipun omzet usaha cukup baik³. Pencatatan pembukuan usaha yang teratur sangat penting untuk memantau perkembangan usaha, mengelola arus kas, dan memudahkan evaluasi keuntungan dan kerugian³. Melalui pelatihan dan pendampingan, anggota koperasi mampu mengisi buku kas secara mandiri dan memahami pembukuan sederhana, yang berdampak positif pada kesehatan dan keberlanjutan usaha mereka³. Literasi keuangan yang baik juga memudahkan akses pembiayaan formal, memperkuat posisi perempuan dalam ekonomi (Marianah et al., 2023).

Perempuan pelaku UMKM seringkali harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, yang menyebabkan beban kerja berat dan kurangnya pengakuan serta perlindungan hukum yang memadai. Ketidaksetaraan gender tercermin dalam akses terbatas terhadap kepemilikan ekonomi dan sumber daya usaha, yang masih didominasi oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini menghambat perempuan dalam mengembangkan usaha secara mandiri dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat keluarga dan komunitas (Widiarty, 2023).

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI), yang diluncurkan pada Desember 2024 sebagai kelanjutan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). RBI bertujuan mengakselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan, termasuk KemenPPPA, KemenkopUKM, dan pemerintah daerah. Program ini menargetkan indikator pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan sebagai salah satu prioritas utama (KemenPPPA, 2025).

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga menginisiasi peta jalan ekonomi perawatan (care economy roadmap) 2025-2045 untuk meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi perawatan yang sangat penting bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional. Program-program pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan, serta insentif bagi UMKM perempuan terus dikembangkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan (KemenPPPA, 2024).

Organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta juga berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. CARE Indonesia, misalnya, menjalankan program Asosiasi Simpan Pinjam Desa (VSLA) yang mendorong pembentukan kelompok menabung mandiri untuk perempuan dan anak perempuan, memberikan pelatihan literasi keuangan, serta akses pinjaman mikro. Program ini membantu perempuan membangun mata pencaharian yang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat hak perempuan atas sumber daya keuangan dan kemampuan mengambil keputusan (CARE Indonesia, 2023).

Studi Kasus

1. Koperasi Srikandi Berbakti, Gresik

Di Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik, Jawa Timur, berdiri koperasi wanita “Srikandi Berbakti” yang menjadi contoh bagaimana perempuan bisa menjadi agen penggerak ekonomi lokal, bahkan di lingkungan industri. Didirikan pada 2016, koperasi ini diinisiasi oleh ibu-ibu PKK dengan dukungan dari pemerintah kelurahan dan PT Petrokimia Gresik. Fokus utama koperasi adalah memproduksi olahan tanaman rosella, seperti the celup, sirup, dan minuman herbal, yang memiliki potensi nilai tambah ekonomi tinggi.

Namun, koperasi ini menghadapi tantangan dalam bentuk rendahnya motivasi dan keterampilan anggota, lemahnya pemahaman kewirausahaan, serta pemasaran yang masih konvensional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Universitas Muhammadiyah Gresik melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan metode pelatihan ceramah, demonstrasi, dan diskusi interaktif. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus koperasi terhadap konsep kewirausahaan dan pentingnya pemasaran digital. Walaupun partisipasi anggota baru mencapai 60%, program ini menjadi batu loncatan penting dalam transformasi koperasi dari skala subsisten ke arah yang lebih modern dan kompetitif (Chotijah et al., 2022).

2. Organisasi Perempuan Islam di Kota Serang

Di Kota Serang, organisasi perempuan Islam seperti Aisyiyah Muhammadiyah, Muslimat NU, dan Persistri Persis memainkan peran strategis dalam pemberdayaan perempuan, bahkan di tengah budaya patriarki yang kuat. Aisyiyah tidak hanya berperan dalam dakwah dan pendidikan agama, tetapi juga aktif dalam pelatihan manajemen koperasi, literasi hukum, pelatihan eco-enzim, dan pendampingan narapidana perempuan. Usaha koperasi simpan pinjam dan penjualan kebutuhan sekolah menjadi tulang punggung ekonomi organisasi dan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi para kader perempuan.

Muslimat NU, dengan koperasi dan bank sampah, menunjukkan bagaimana

pemberdayaan ekonomi dapat bersinergi dengan pelestarian lingkungan. Keuntungan koperasi digunakan untuk kesejahteraan anggota, seperti beasiswa, dana sosial, dan penguatan ekonomi keluarga. Program penyuluhan kesehatan dan pencegahan stunting yang mereka jalankan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kesehatan dan pendidikan keluarga. Inisiatif seperti ini memperlihatkan bahwa organisasi berbasis keagamaan bisa menjadi agen pemberdayaan multidimensi yang inklusif dan berkelanjutan (Stiawati et al., 2025).

3. UMKM Perempuan di Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara juga menjadi contoh bagaimana UMKM bisa menjadi penggerak utama pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemerintah daerah telah meluncurkan program seperti Kredit Melawan Rentenir, UMKM Go Export, serta pelatihan dan pendampingan UMKM kelompok wanita. Namun, tantangan besar tetap ada dalam bentuk keterbatasan modal usaha, akses pasar yang sempit, dan rendahnya kapasitas manajerial pelaku UMKM.

Melalui program KKN Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dilakukan pelatihan ekonomi kreatif dan digital marketing kepada kelompok UMKM perempuan. Program ini menciptakan kelompok usaha kreatif berbasis potensi lokal, seperti olahan pangan, kerajinan tangan, dan fashion etnik. Dampaknya cukup positif: perempuan mengalami peningkatan pendapatan, produktivitas, dan kemandirian dalam mengelola usahanya. Namun, tantangan tetap ada dalam hal permodalan dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan mitra lembaga keuangan mikro (Wardani, 2023)

4. Koperasi Wanita Sejati dan Tunas Jaya di Pamekasan

Koperasi Wanita Sejati (Pademawu Timur) dan Tunas Jaya (Desa Bunder), keduanya di Kabupaten Pamekasan, merupakan model koperasi perempuan yang berhasil memanfaatkan dana hibah pemerintah untuk penguatan ekonomi lokal. Dengan keanggotaan masing-masing 93 dan 23 orang, serta modal awal Rp 61 juta dan Rp 25 juta, koperasi ini fokus pada usaha simpan pinjam dan pengolahan produk lokal. Tantangan utama adalah rendahnya kapasitas SDM, rendahnya motivasi, dan masalah kredit macet.

Untuk mengatasi hal ini, koperasi menerapkan sistem tanggung renteng yang menekankan kolektivitas tanggung jawab antaranggota. Pelatihan administrasi dan penguatan manajemen koperasi dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas tata kelola. Keberhasilan koperasi ini menunjukkan bahwa dengan sistem pengelolaan yang transparan dan partisipatif, koperasi wanita mampu menjadi institusi ekonomi yang tangguh dan menopang kesejahteraan keluarga anggotanya (Haryanto, 2016)

5. Pelatihan Akuntansi Digital IWAPI Aceh

Inisiatif pelatihan akuntansi digital oleh IWAPI Aceh memberikan gambaran tentang pentingnya literasi digital dalam pengelolaan UMKM perempuan. Dengan menggunakan aplikasi SIAPIK dari Kementerian Koperasi dan UKM, pelatihan ini membantu 36 peserta dalam mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan mengatur arus kas usaha mereka. Sebanyak 80% peserta mengalami peningkatan signifikan dalam keterampilan akuntansi, dan 70% menyatakan siap untuk mengakses pembiayaan formal berkat pembukuan yang lebih

transparan.

Walaupun masih terdapat hambatan dalam akses teknologi dan keterampilan digital, pelatihan ini membuktikan bahwa perempuan bisa mengadopsi teknologi jika difasilitasi dengan metode pembelajaran yang kontekstual. Model pelatihan ini bisa direplikasi di berbagai daerah dengan modifikasi sesuai dengan tingkat literasi dan infrastruktur digital yang tersedia (Antaraneews, 2021).

Dari sintesis dan studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal. Pemberdayaan ini tidak sekadar soal peningkatan pendapatan, tetapi juga membentuk kepercayaan diri, jaringan sosial, dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Model pemberdayaan yang paling berhasil adalah yang mengintegrasikan pelatihan praktis, digitalisasi, penguatan kelembagaan, dan pendampingan berkelanjutan. Keberhasilan juga ditentukan oleh kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, sektor swasta, dan LSM. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi keuangan dan digital, kualitas manajemen usaha, dan akses pembiayaan. Oleh karena itu, strategi penguatan perlu diarahkan pada pengembangan kapasitas individu, penguatan sistem koperasi, serta integrasi teknologi secara bertahap.

Simpulan

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM di Indonesia telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga. Koperasi perempuan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah/'Aisyiyah, koperasi wanita berbasis komunitas lokal, serta organisasi perempuan Islam berperan strategis dalam mendorong pelatihan kewirausahaan, adopsi teknologi digital, penguatan aspek legalitas usaha, serta advokasi kesetaraan gender. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi program pelatihan, pendampingan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi utama untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan mencakup peningkatan pelatihan berbasis digital, pendampingan dalam aspek legalitas usaha, serta penguatan struktur kelembagaan koperasi sebagai pilar pemberdayaan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat baik secara sosial maupun keagamaan, tetapi juga terbukti secara empiris mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, efektivitas upaya tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemerintah perlu memastikan tersedianya akses permodalan yang inklusif dan mudah dijangkau oleh perempuan pelaku UMKM, serta menyederhanakan proses legalitas usaha agar tidak menjadi hambatan administratif. Selain itu, pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi dengan literasi digital dan manajemen keuangan

harus terus diperluas, sehingga perempuan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Penguatan kelembagaan koperasi perempuan juga harus menjadi prioritas, melalui penyediaan insentif fiskal, pendampingan usaha, serta fasilitasi jejaring pemasaran yang lebih luas. Pemerintah diharapkan dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, guna menciptakan sinergi yang berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Lebih jauh, implementasi sistem pemantauan dan evaluasi berbasis gender sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dalam mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera di masa depan.

Daftar Rujukan

- Afifah, A. N. (2022). Peran Koperasi Wanita Mayangsari Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Di Desa Banjarrejo Lampung Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Anjani, H. (2021). Potensi Dan Tantangan Wirausaha Perempuan Dalam Perekonomian Indonesia. Noor Center for Indonesian Policy Studies.
- Antaraneews.com. (2021). IWAPI Aceh adakan pelatihan akuntansi digital untuk UMKM perempuan. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/iwapi-aceh-pelatihan-akuntansi-digital>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan [RPJMN 2020-2024]. <https://www.bappenas.go.id>
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Jawa Barat. (2024). Laporan program pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM perempuan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Febrianti Wardani. (2023, September 17). Sukses tumbuhkan UMKM melalui pemberdayaan kelompok tani wanita di Kabupaten Mandailing Natal. Kompasiana.
- Food and Agriculture Organization. (2019). Innovative approaches to gender and food security: Insights, issues, and practices. FAO. <https://www.fao.org/3/ca4657en/ca4657en.pdf>
- Haryanto, R. (2016). Peningkatkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan managerial koperasi wanita di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 13(2), 449-482. <https://www.kompasiana.com/febriantiwardani2039/6505b8724addee3c513faf82/sukses-tumbuhkan-umkm-melalui-kelompok-tani-wanita-di-kabupaten-mandailing-natal>
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and change*, 30(3), 435-464.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Laporan Statistik UMKM dan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Strategi nasional pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. KemenPPPA. <https://www.kemenpppa.go.id>

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Menteri PPPA luncurkan Ruang Bersama Indonesia di Bali, dorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTY1Ng==>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Kurniawati, I., Heriyanto, H., Amsury, F., & Fahdia, M. R. (2022). Pelatihan pemanfaatan media sosial dan desain sebagai media promosi untuk meningkatkan branding produk dan pendapatan pada UMKM Koperasi Wanita ATSIRI. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 115-121.
- Lastri, S., Marlizar, M., Maulidi, S., & Tarmizi, T. (2025). Edukasi Akuntansi Digital dalam Upaya Meningkatkan Literasi Keuangan dan Efisiensi Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI). *ABDI KAMOE: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(1), 8-16.
- Maisaroh, I., Mahpudin, M., & Stiawati, T. (2025). Pemberdayaan perempuan melalui ormas Islam wanita di Kota Serang. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 8(1), 1-18.
- Marianah, M., Suwati, S., & Ariani, Z. (2023). PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN MELALUI PELATIHAN PEMBUKUAN SEDERHANA BAGI UMKM ANGGOTA KOPWAN 'AISYIYYAH LOMBOK UTARA. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 4(1), 28-32.
- Mosedale, S. (2005). Assessing women's empowerment: towards a conceptual framework. *Journal of international development*, 17(2), 243-257.
- OECD. (2017). Building inclusive societies through gender-sensitive monitoring and evaluation. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264273260-en>
- Rahmi, V. A., Astutik, R. P., & Chotijah, U. (2022). Pendampingan Kewirausahaan dalam Tema: "NGIPIK Sebagai Kelurahan Kampung Berdaya", melalui Pengembangan Koperasi Srikandi Berbakti (Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik). *Jurnal Pengabdian Manajemen*, 2(1), 15-19.
- Ramdlaningrum, H., Ismah, N., Mawesti, D., Aidha, C. N., Armintasari, F., & Ningrum, D. R. (2023). Pemberdayaan Ekonomi untuk UMKM yang Dipimpin Perempuan di Pedesaan Indonesia: Pelajaran dari CSO Indonesia. *Perkumpulan PRAKARSA*.
- Sulastri, S. (2023). Ruang Bersama Indonesia dan Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. *Info Singkat: Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan*, 15(5), 1-6.
- Tholib, M., Mutamimah, M., & Adibah, I. Z. (2021). Peningkatan Kompetensi Kewirausahaan Pada Masa Covid 19 Bagi Pengusaha Aisyiyah. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 9(2), 212-226.
- UN Women. (2018). Turning promises into action: Gender equality in the 2030 agenda for sustainable development. United Nations. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development>
- Widiarty, W. S. (2023). Peran Perempuan Terhadap UMKM Dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *UNES Law Review*, 6(1), 1-7
- World Bank. (2020). Women, business and the law 2020. World Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32639>